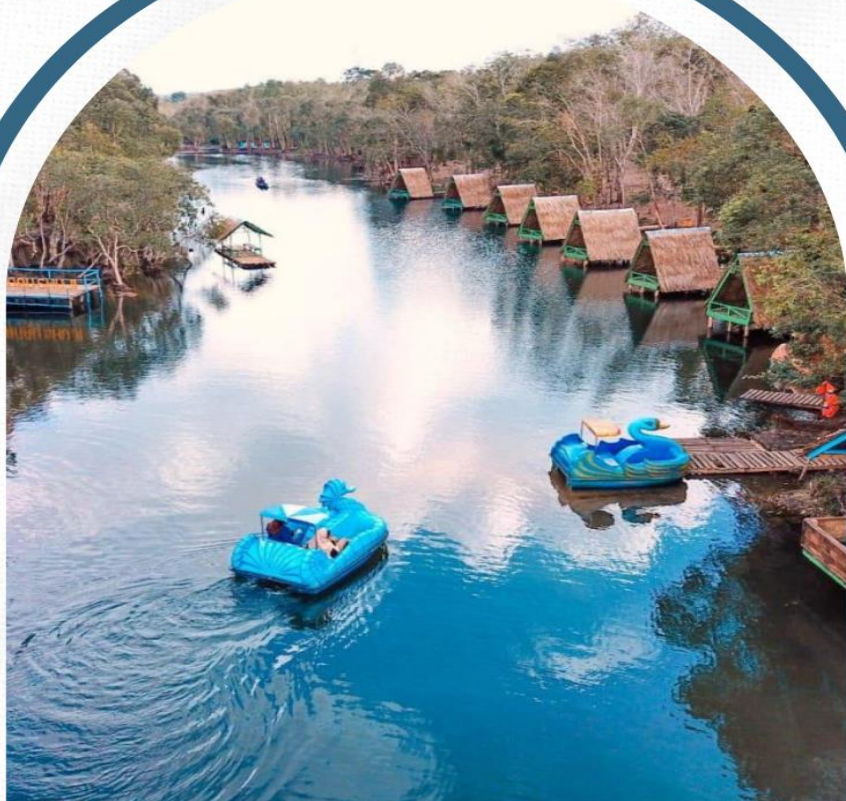




RINGKASAN KAJIAN

PENGEMBANGAN MODEL DESA WISATA BERKELANJUTAN BERBASIS MASYARAKAT (*COMMUNITY BASED TOURISM-CBT*) DI KABUPATEN MUARA ENIM



2
0
2
4



ABSTRAK

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat meningkatkan perekonomian daerah. Sejak tahun 2021, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif lebih fokus pada pengembangan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) yaitu diharapkan pariwisata dapat memberikan dampak jangka panjang, baik untuk lingkungan, sosial, budaya serta ekonomi masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis Pengembangan Model Desa Wisata Berkelanjutan Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism-CBT*) sebagai upaya meningkatkan pendapatan pada sektor pariwisata di Kabupaten Muara Enim. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data primer dan sekunder yang didapat melalui teknik wawancara mendalam dan analisis dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis isi melalui tahapan analisis data dimulai dari: 1) *Sort & Classify*; 2) *Open Coding*; 3) *Axial Coding*; 4) *Selective Coding* dan 5) *Interpretatif & Elaborate*. Model pengembangan desa wisata berkelanjutan berbasis masyarakat dilakukan melalui penguatan kebijakan dengan menitikberatkan berbagai kerjasama serta upaya masyarakat baik berupa unsur kelembagaan kemasyarakatan ataupun entitas kelompok masyarakat mandiri pengelola pariwisata. Selain itu, diperlukan peran pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat melalui upaya keterlibatan serta interaksi aktor pentahelix dalam menyinergikan berbagai bentuk kolaborasi dan interaksi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Faktor-faktor pengembangan desa wisata berbasis masyarakat memperhatikan konsep yang diajukan untuk memperkuat dimensi utama dari kehadiran masyarakat lokal sebagai pengelolanya, sehingga menjadi fokus kerangka pengembangan kebijakan dalam penguatan partisipasi masyarakat kebijakan akselerasi dalam pengembangan desa berbasis masyarakat. Terakhir, citra destinasi wisata yang berguna untuk menjadi parameter pembentuk dukungan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat masih ditinjau dari aspek *affective image* sehingga diperlukan pengembangan parameter ke *cognitive image* dalam memandu pembangunan destinasi wisata di desa.

Kata Kunci: *Community Based-Tourism*, desa wisata, sinergi pentahelix, citra wisata, Kebijakan akselerasi pariwisata

PENDAHULUAN

Pariwisata berbasis komunitas mencakup partisipasi dan kolaborasi efektif dari komunitas lokal dalam konsep wisata berkelanjutan ((Dangi dan Jamal, 2016; Trejos et al., 2008; Telfer dan Wall, 2000, dalam Habiba & Lina, 2023)). Lebih lanjut lagi menurut Sharply (2008) dalam (Habiba & Lina, 2023) bahwa CBT jika dipadukan dengan pariwisata berkelanjutan dapat menjadi manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan bagi masyarakat lokal dengan menciptakan peluang untuk melindungi sumber daya lokal dan memanfaatkannya sebaik mungkin. CBT juga bisa menjadi daya ungkit perekonomian daerah dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki.

Pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis CBT saat ini menjadi populer dan prioritas bagi beberapa pemerintah daerah termasuk Kabupaten Muara Enim. Kabupaten Muara Enim yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pariwisata yang kaya dan beragam seperti potensi wisata alam, wisata satwa, maupun wisata budaya yang perlu dikembangkan menjadi industri pariwisata. Menurut data dari BPS (2024) bahwa pada tahun 2023, di Muara Enim terdapat sekitar 121 daya tarik wisata yang terdaftar di Dinas Pariwisata. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah daya tarik wisata sebanyak 94. Kenaikan jumlah daya tarik wisata tidak diimbangi dengan kenaikan jumlah wisatawan. Pada tahun 2016 jumlah wisatawan baik wisatawan nusantara dan mancanegara sebanyak 36.828 pengunjung, jumlah ini naik pada tahun 2017 menjadi 48.468 pengunjung. Namun pada tahun 2018, jumlahnya turun menjadi 31.508 pengunjung. Penurunan jumlah pengunjung ini menjadi hal yang harus menjadi bahan evaluasi bagi keberlanjutan pariwisata di Kabupaten Muara Enim untuk tahun-tahun mendatang.

Pada saat ini, pengembangan pariwisata berkelanjutan cukup populer dikembangkan di beberapa daerah. Salah satu bentuk pengembangan model pariwisata berkelanjutan adalah dengan membentuk desa wisata. Dengan adanya desa wisata diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi masyarakat *Community Based Tourism* lokal untuk terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian terkait pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (CBT) dengan harapan konsep ini bisa diterapkan di Kabupaten Muara Enim.

Keberhasilan program pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis CBT ini tidak terlepas dari perlunya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat sekitar sebagai pihak yang berpartisipasi dan berperan menjadi pelaku pariwisata. Namun demikian, meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan partisipasi masyarakat bukan hal yang mudah karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pengembangan pariwisata, kurangnya akses dan informasi kepada masyarakat serta perbedaan kepentingan dan pandangan yang ada dalam masyarakat terkait makna pariwisata bagi mereka (Riyanto & Kovalenko, 2023). Salah satu ketrampilan yang harus dimiliki oleh masyarakat yaitu memberikan pengalaman menarik dan unik kepada wisatawan. Hal ini memerlukan kreativitas dan inovasi dalam memanfaatkan produk lokal. Hal ini diperkuat oleh Pebriani et al. (2024) bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan potensi desa seperti hasil alam mampu meningkatkan perekonomian dan kemandirian masyarakat di desa wisata. Pendampingan yang intens

dapat semakin menyadarkan masyarakat akan pentingnya partisipasi mereka dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan pendapatan.

Pengelolaan pariwisata harus memperhatikan komponen utama pariwisata yaitu konsep 5A. Menurut Valentino Elim et al. (2019) untuk menciptakan pariwisata unggul diperlukan penerapan model 5A (*attraction, accessibility, amenity, accommodations, dan awareness*). Namun 5A ini belum semua mampu dipenuhi oleh pengelola pariwisata. Menurut Fatmasari et al., (2023), infrastruktur pariwisata masih jauh dari kata memadai baik dari sisi ketersediaan maupun kondisi yang sudah ada. Kurangnya infrastruktur ini bisa berdampak pada berkurangnya jumlah pengunjung. Hal ini juga didukung oleh SBM (2020) bahwa infrastruktur pendukung pariwisata di berbagai daerah seperti, hotel, jalan dan transportasi, masih kurang. Selain infrastruktur, agar desa wisata menarik minat pengunjung maka perlu memiliki daya tarik baik berupa atraksi atau produk yang menarik. Salah satu produk yang menjadi khas Kabupaten Muara Enim adalah Batik Kujur. Namun hal ini kurang menarik perhatian karena aspek seasonitas, yaitu produk yang dihasilkan kurang mengikuti tren dan mode, aspek sensitivitas dari segi harga yang masih tergolong mahal dan aspek aksesibilitas yaitu tidak adanya petunjuk jalan yang memudahkan pengunjung datang ke lokasi Sentra Industri Batik Kujur (Selviyanti et al., 2020).

Kabupaten Muara Enim memiliki enam desa wisata yang masih masuk kategori perintis, yaitu desa wisata yang baru mulai beroperasi dan masih dalam lingkup yang terbatas, sehingga bisa dikatakan bahwa desa wisata tersebut belum optimal dalam mengembangkannya. Salah satunya Desa Tanjung Baru, yang sebenarnya memiliki potensi untuk berkembang menjadi desa wisata, diantaranya yaitu produk olahan hasil desa seperti nanas, umbi-umbian, kerupuk/kemplang, dan lahan luas yang memiliki aliran air sungai yang sangat jernih. Namun sayangnya potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk dijadikan sebagai objek wisata yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa (Pebriani et al., 2024). Pemanfaatan potensi/sumber daya merupakan salah satu daya tarik yang bisa menarik wisatawan. Namun, desa wisata tersebut belum mengoptimalkan potensi yang dimiliki dengan baik. Secara kelembagaan, desa wisata perlu memiliki lembaga yang mengurus baik dari sisi pengembangan desa wisata, penjualan produk, atraksi maupun promosi. Lembaga yang mengelola desa wisata adalah BUMDes dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Salah satu contoh pengelolaan desa wisata oleh BUMdes adalah Desa Wisata Tanjung Medang. Pengelolaan yang dilakukan dapat dikatakan belum optimal yang dinilai dari produk-produk hasil produksi Desa Wisata Tanjung Medang. Beberapa hasil produksi Desa Wisata Tanjung Medang tidak dapat menembus pasar yang lebih besar, kecuali produk karet dan nanas. Hal ini karena tata kelola ekonomi kreatif dan potensi pariwisata di Desa Wisata Tanjung Medang tidak tertata dengan baik (Randi et al., 2020).

Pembangunan pariwisata yang berbasis masyarakat merupakan perjalanan kolektif yang membutuhkan kolaborasi. Namun, kurangnya dukungan dan koordinasi pemerintah daerah (OPD terkait) dengan pelaku pariwisata, BUMDes dan pihak swasta menjadi tantangan dan permasalahan dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan (Anshori, 2023). Pembangunan pariwisata berkelanjutan tidak mudah jika kebijakan ditingkat lokal tidak mendukung. Pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan waktu 10-20 tahun namun siklus politik hanya bertahan

5-10 tahun, sehingga dukungan dan koordinasi antar pelaku pariwisata dan kebijakan yang mendukung sangat diperlukan. Sebagaimana yang terjadi pada desa wisata Tanjung Medang, belum optimalnya tata kelola disebabkan oleh kurangnya kerjasama antar pihak baik dari sisi warga, pemerintah dengan BUMDes selaku pengelola. Agar tata kelola desa wisata optimal maka baik warga dan pemerintah desa perlu bekerjasama untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pemerintah desa melalui BUMDes (Randi et al., 2020). Selain itu, perlu juga adanya kerjasama dengan seluruh pihak termasuk pihak swasta seperti pada pengembangan Danau Shuji yang telah melibatkan pihak swasta, Pertamina EP Prabumulih Field, dan bekerjasama dengan Pokdarwis (Rosadi et al., 2022).

Pertanyaan Kajian

Desa wisata menjadi pendekatan yang mengelaborasi kapasitas masyarakat dalam mengelola berbagai potensi pariwisata yang dimiliki kabupaten Muara Enim. Uraian permasalahan mengenai pengembangan pariwisata pada desa-desa yang ada di Muara Enim yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, menjadi dasar pengajuan pertanyaan mengapa menjadikan pengembangan model desa wisata berkelanjutan berbasis masyarakat sebagai upaya meningkatkan pendapatan pada sektor pariwisata di Kabupaten Muara Enim. Selanjutnya, dapat dirumuskan pertanyaan kajian sebagai berikut:

1. Bagaimana model pengembangan desa wisata berkelanjutan berbasis masyarakat (*community based tourism-cbt*) melalui penguatan kebijakan di Kabupaten Muara Enim?
2. Bagaimana peran serta para pemangku kepentingan (*stakeholder*) baik pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Muara Enim?
3. Apa saja faktor-faktor yang berperan dalam pengembangan desa wisata berkelanjutan berbasis masyarakat (*community based tourism-cbt*) di Kabupaten Muara Enim?

KAJIAN LITERATUR

Model Pariwisata Berbasis Masyarakat/*Community Based Tourism (CBT)*

Pariwisata berbasis masyarakat (CBT) adalah jenis pariwisata berkelanjutan yang menekankan keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengoperasian kegiatan pariwisata. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman yang lebih otentik dan mendalam secara budaya bagi para wisatawan, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat lokal secara ekonomi dan sosial. Prinsip-prinsip inti dari CBT meliputi: (1) Pemberdayaan Masyarakat: Penduduk setempat secara aktif terlibat dalam semua aspek pariwisata, mulai dari perencanaan hingga pengambilan keputusan, untuk memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan mereka diprioritaskan; (2) Pengalaman Budaya yang Otentik: CBT berfokus pada menampilkan budaya dan tradisi unik masyarakat setempat, menawarkan pengalaman yang asli dan mendalam kepada para wisatawan; (3) Manfaat Ekonomi: Manfaat ekonomi dari pariwisata diarahkan kepada masyarakat setempat, mendukung bisnis lokal dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah secara keseluruhan; (4)

Kelestarian Lingkungan: CBT menekankan pentingnya pelestarian dan kelestarian lingkungan, memastikan bahwa kegiatan pariwisata tidak merusak ekosistem lokal.

Rochman (2016) mengungkapkan model pembangunan yang dikenal sebagai pembangunan wisata berbasis masyarakat (CBT) memberikan masyarakat pedesaan peluang yang paling besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata. Pengembangan pariwisata berkelanjutan di desa wisata bergantung pada masyarakat setempat yang dapat berpartisipasi secara langsung dalam pembangunan, kepemilikan, dan pengelolaan fasilitas dan layanan wisata. Pada akhirnya, mereka berharap masyarakat dapat memanfaatkan keuntungan ekonominya sambil mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Ini dapat dicapai jika ada hubungan yang baik dan sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan industri pariwisata. Permatasari (2022) menunjukkan bahwa model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat menekankan peran aktif masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Pembangunan pariwisata berkelanjutan juga merupakan tujuan dari pariwisata berbasis masyarakat. Untuk memastikan pariwisata yang berkelanjutan, masyarakat lokal sangat penting. Untuk pariwisata berkelanjutan, peran pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha pariwisata juga sangat penting.

CBT merupakan pariwisata berkelanjutan yang semakin populer yang berfokus pada pelibatan dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan kegiatan pariwisata di wilayah mereka sendiri. Pendekatan ini tidak hanya bermanfaat bagi penduduk setempat dengan menciptakan peluang ekonomi dan melestarikan warisan budaya, tetapi juga memberikan pengalaman yang otentik dan mendalam bagi para wisatawan. Keberhasilan pariwisata berbasis masyarakat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang mungkin berbeda antara negara berkembang dan negara maju (Tosun, 2000).

Target Pasar Pariwisata Daerah

Target pasar untuk industri pariwisata regional terdiri dari kelompok pelanggan yang spesifik dengan preferensi dan kebutuhan yang berbeda. Memahami target pasar dengan baik sangat penting dalam industri pariwisata yang kompetitif untuk mengembangkan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Dalam hal menargetkan pasar pariwisata di daerah mana pun, sangat penting untuk memahami kebutuhan dan preferensi spesifik wisatawan. Dengan mengembangkan strategi yang komprehensif untuk menarik wisatawan ke Pasar Pariwisata Daerah, dapat secara efektif menampilkan penawaran unik dan menarik pengunjung dari berbagai Lokasi (Saraswati, & Athia, 2018). Agar dapat secara efektif menargetkan pasar pariwisata di Pasar Pariwisata Daerah, sangat penting untuk terlebih dahulu memahami beragam kebutuhan dan preferensi pengunjung potensial. Dengan memahami demografi, minat, dan perilaku perjalanan dari target audiens, dapat memungkinkan dilakukan penyesuaian upaya pemasaran guna memenuhi kebutuhan spesifik mereka. Selain itu, melakukan riset pasar untuk mendapatkan wawasan tentang preferensi segmen wisatawan yang berbeda akan sangat membantu dalam mengembangkan strategi pariwisata yang tepat sasaran dan berdampak bagi daerah tersebut (An overview, 2017)

Tujuan strategi pemasaran memungkinkan industri pariwisata lokal mencapai sasarannya dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Pada kenyataannya, organisasi pariwisata daerah harus memiliki struktur organisasi yang memiliki pandangan jauh ke depan dan didukung oleh sumber daya manusia yang berpengalaman untuk menerapkan strategi pemasaran daerah yang efektif. Ada keyakinan bahwa keberhasilan suatu program pemasaran pariwisata sangat bergantung pada pemahaman bersama tentang peran pariwisata dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, sebelum program dimulai, semua pihak terkait harus setuju bahwa pariwisata adalah sektor ekonomi yang dapat diterima dan merupakan agen perubahan (Jaka Waskita, 2008). Sedangkan Khairina (2022) mengungkapkan bahwa terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan dalam pemasaran pariwisata diantaranya: (1) Komunikasi pemasaran; (2) Fungsi Pemasaran, yang terdiri dari fungsi strategis, fungsi operasi dan fungsi riset; serta (3) Model komunikasi dalam pemasaran pariwisata. Selanjutnya Tkaczynski et al. (2008) menyatakan pendekatan pemasaran yang digunakan oleh penyedia layanan pariwisata dapat ditingkatkan. Beberapa operator pariwisata mengindikasikan bahwa mereka tidak melakukan segmentasi dengan menggunakan variabel tertentu seperti gaya hidup, perilaku pembelian, dan pengeluaran.

Kapasitas Pariwisata Daerah

Dalam konteks pengembangan pariwisata, kapasitas pariwisata daerah didefinisikan sebagai kemampuan dan potensi sebuah daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan industri pariwisata secara efisien dan efektif. Beberapa sumber menganggap kapasitas pariwisata daerah sebagai komponen penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 menetapkan kapasitas pariwisata daerah sebagai faktor yang memengaruhi alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk Pelayanan Kepariwisata. Daerah yang memiliki kapasitas pariwisata yang lebih baik, seperti memiliki perangkat daerah dengan nomenklatur pariwisata, memiliki tugas dan fungsi pengembangan pariwisata, dan telah ditetapkan melalui peraturan daerah, lebih mungkin menerima alokasi.

Kemampuan masyarakat setempat untuk mengembangkan industri pariwisata juga berkorelasi dengan kapasitas pariwisata daerah. Studi yang dilakukan di Desa Wisata Grogol menemukan bahwa komunitas desa wisata memiliki kekuatan yang dikenal sebagai kapasitas komunitas, yang dapat membantu pertumbuhan pariwisata, terutama pariwisata pedesaan di Indonesia (Nurcahyono, 2017). Selain itu, peningkatan kapasitas pariwisata daerah memerlukan dukungan dari pemerintah daerah. Hasil penelitian yang dilakukan di Danau Singkarak (Aromatica & Sitriwanti, 2019) menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih kurang dalam mengembangkan pariwisata. Oleh karena itu, pengembangan destinasi wisata di Danau Singkarak dan pengembangan sistem manajemen yang jelas diperlukan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah. Wang et al. (2020) mengungkapkan TCC dapat didefinisikan sebagai jumlah maksimum wisatawan dan sistem evaluasi dan penetapan ambang batas TCC harus melihat beberapa hal diantaranya: (1) Batas fisik, (2) Batas

pariwisata, (3) Batasan berbasis masyarakat, (4) Kerangka kerja sistem, (5) Pengaturan ambang batas, dan (6) Tren dinamis.

Untuk mendukung masyarakat lokal dari tingkat atas, pemerintah daerah mengembangkan pariwisata pedesaan yang berbasis pada komunitas lokal dalam bentuk desa wisata ini. Di sisi lain, ada desa wisata yang muncul sebagai hasil dari inovasi masyarakat lokal. Nurcahyono (2017) melihat beberapa aspek diantaranya adalah kapasitas komunitas dalam pengembangan pariwisata dan *Community Based Tourism* (CBT). Vahdatiyekta et al. (2024) menjelaskan juga bahwa masyarakat setempat di Desa Sebunguk membutuhkan pengawasan dan pendampingan komunitas pariwisata, terutama dalam hal pemasaran produk pariwisata. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan mitra sangat penting dilakukan dalam menerapkan pemasaran pariwisata kreatif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi dari wisatawan dan distribusi yang buruk dari informasi tersebut. Selain itu, komunitas wisata di Open Pit Nam Salu harus dilatih dalam menggunakan sumber daya pariwisata kreatif. Selama ini, pemandu wisata yang cerdas membantu pengelolaan destinasi tersebut. Hal tersebut tidak lepas dari konsep yang dianalisis yaitu: (1) Pemberdayaan Masyarakat; (2) *Community Based Tourism*; dan (3) Pariwisata Kreatif.

Kebijakan Desa Wisata

Kebijakan desa wisata merupakan keterlibatan masyarakat seutuhnya dalam mengelola berbagai kegiatan pariwisata dan menjadikan desa tersebut memiliki kapasitas dalam mengembangkan potensi wisatanya, mulai dari masyarakat, pemerintah desa dan pelaku usaha yang terdapat di desa tersebut (Wisata Desa dan Desa Wisata). Pengembangan desa wisata berbasis masyarakat menuntut adanya kepemilikan kesadaran penuh terhadap potensi wisata termasuk pengembangannya; telah menjadi tujuan wisata yang terkenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan termasuk wisatawan mancanegara; sarana dan prasarana serta fasilitas wisata yang memadai; masyarakat mampu mengelola usaha pariwisata; melalui keterlibatan POKDARWIS masyarakat telah mampu memanfaatkan dana desa untuk pengembangan desa wisata; serta sistem pengelolaan desa wisata yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat di desa dan pendapatan asli desa (Syaiful et al., 2023).

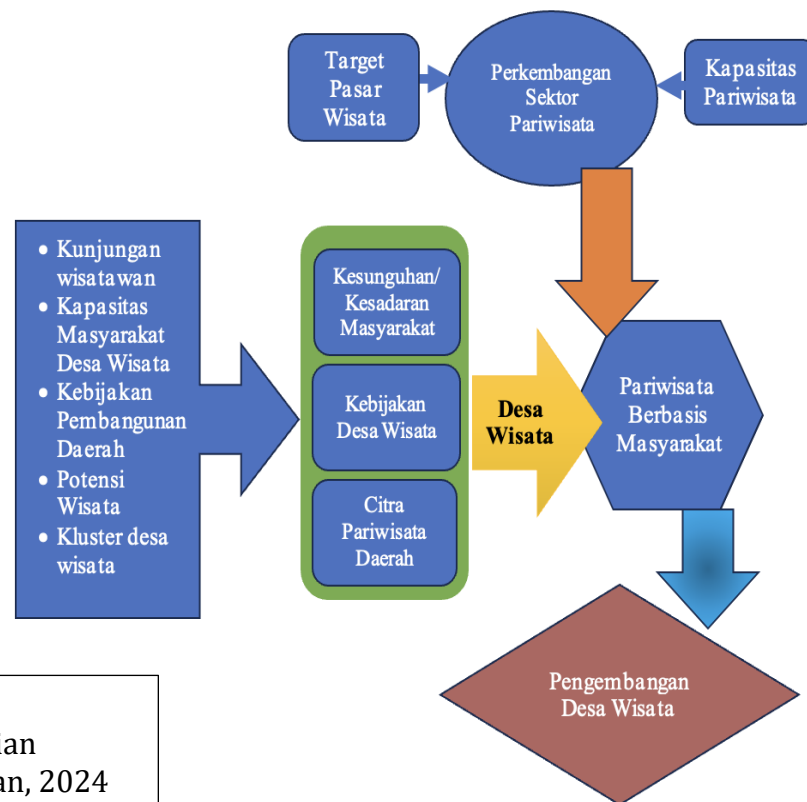
Kebijakan desa wisata melekat dengan *community based tourism* (CBT) yang memanfaatkan masyarakat sebagai penggerak. Konsep CBT yang diterapkan untuk mencapai pengelolaan pariwisata berkelanjutan diterapkan dalam bentuk partisipasi masyarakat lokal, pembentukan lembaga desa wisata, destinasi wisata ramah lingkungan dan industri kreatif (Utami et al., 2019). Selain itu, pentingnya sinergi pemerintah daerah dan desa perlu bekerja sama dengan pihak ketiga seperti pelaku industri pariwisata yang berpengalaman agar masyarakat tertarik dan antusias mengikuti pelatihan sekaligus memperkuat kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat serta menciptakan komunikasi yang baik dan intensif untuk mewujudkan program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat (Windayani & Marhaeni, 2019).

Selain itu, kebijakan desa wisata didukung dengan kekuatan usaha yang dibiayai desa melalui BUMDesa. Model pengelolaan BUMDesa Desa Wisata merupakan strategi dalam sistem pengelolaan desa wisata, meliputi pengelolaan keuangan, dan tata kelola kerjasama promosi dan pemasaran (*online*) yang harus didukung dengan

peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengurus BUMDesa melalui pelatihan penggunaan sistem tersebut (Rizki Lubis et al., n.d.). Pengembangan desa wisata oleh BUMDesa melalui pengembangan daya tarik wisata alam di desa wisata yang menjual keindahan alam yang tidak ditemui di wilayah perkotaan (Izmi & Prathama, 2023).

Pengembangan Desa Wisata dilakukan dengan membuat *master plan*, menumbuhkan peran masyarakat sekitar, peningkatan peran pemerintah, menarik investor masuk, memperbaiki sarana dan prasarana wisata alam, membangun sektor usaha pendukung, dan memaksimalkan wisata pendukung di Desa (Ratwianingsih & Mulyaningsi, 2021). *Blueprint* wisata desa ini dapat mempermudah pihak desa mengeksekusi rencana di sektor kepariwisataan dengan manfaat utama dari *blueprint* wisata desa yang telah dibuat adalah untuk mempermudah kerangka kerja masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaan program yang berfokus pada kepariwisataan dari kawasan Desa (Hanggraito et al., 2023).

Kajian ini menganalisis kapasitas pariwisata daerah dengan mempertimbangkan beberapa konsep diantaranya: (1) Dukungan pemerintah daerah berupa kebijakan terkait pariwisata; (2) *Community Based Tourism* (CBT); (3) Pariwisata kreatif yang berkelanjutan; (4) Konsep kolaboratif dan daya dukung; (5) *trend* pengunjung dan analisis pasar dan (6) dukungan kebijakan desa wisata yang disiapkan pemerintah daerah. Adapun kerangka pikir kajian ini digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1 Alur Pikir Kajian
Sumber: Olahan Penelitian, 2024

METODE

Pendekatan Kajian

Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan pada kajian Pengembangan Model Desa Wisata Berkelanjutan Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism-CBT*) pada Kabupaten Muara Enim memberikan fokus dalam pembahasan terkait model desa wisata dengan peran aktif masyarakat. Selain itu, berbagai penguatan model desa wisata juga menguraikan berbagai pandangan terkait dengan potensi dan kolaborasi dari penyelenggaraan desa wisata berbasis masyarakat. Penelitian deskriptif (*descriptive research*), yang biasa disebut juga penelitian taksonomik (*taxonomic research*), dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti (Mulyadi, 2013, p. 132). Desa wisata dengan berbasis CBT menjadi unit tema yang dikaji dengan mendalami model pemberdayaan masyarakat serta strategi pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam mengakselerasi pengelola pariwisata.

Studi kasus-deskriptif menjadi metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini. Penggunaan metode studi kasus bertujuan untuk mengetahui model kualitatif dari strategi penyelenggaraan desa wisata berbasis *community based tourism*. *As a strategy, the case study is used in many situations to contribute to our knowledge of individu, group, organizational, social, political and related phenomena* (Yin, 2003, p. 1). Penelitian studi kasus digunakan untuk mengungkapkan mengapa Pengembangan Model Desa Wisata Berkelanjutan Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism-CBT*) dapat meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pariwisata pada wilayah Kabupaten Muara Enim. Sektor pariwisata yang merupakan sub sektor ekonomi tersier diharapkan menjadi penggerak roda perekonomian dan sosial masyarakat pada Kabupaten Muara Enim di masa datang.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara tidak terstruktur. Susunan pertanyaan wawancara tidak kaku, dan lebih mengarah pada percakapan dengan tujuan tertentu, dan mengutamakan perekaman serta transkrip data verbatim (kata per kata) (Rachmawati, 2007, p. 37). Wawancara dilakukan dengan memperhatikan kriteria informan yang dekat dengan tema penelitian. Adapun kriteria informan sebagai berikut:

Tabel 3.1. Kriteria Informan

Dimensi	Aspek Wawancara	Kriteria Informan
Model Pengembangan Desa Wisata	- Kebijakan Pengembangan Pariwisata Daerah - Pembiayaan Pariwisata Di Kabupaten Muara Enim - Target Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat	- Warga Masyarakat - Kepala Desa - Ketua RW/RT/Dusun - Tokoh Penggerak Masyarakat - Kepala Dinas Pariwisata - Kepala Desa - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Dimensi	Aspek Wawancara	Kriteria Informan
	- Peran Pemerintah Daerah Dalam Menyinerigikan Kebijakan Pariwisata Di Tingkat Pusat - Kapasitas Desa - Citra Pariwisata Kabupaten Muara Enim	- Ketua Pokdarwis
	- Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Wisata - Kegiatan Pariwisata Yang Memanfaatkan Potensi Desa - Pengelolaan Wisata Di Desa - Ketersediaan Sumberdaya Dalam Mendukung Desa Wisata - Kesiapan Masyarakat Sebagai Destinasi/Tempat Wisata - Pemanfaatan Potensi Wisata Di Desa	- Warga Masyarakat - Komunitas Masyarakat Pengelola Wisata - Kepala Desa - Direktur Bumdes - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa - Tokoh Pariwisata
	- Inisiatif Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Wisata - Citra Wisata Pada Desa Wisata - Mobilitas Sumber Daya Untuk Pengelolaan Desa Wisata - <i>Community-Based Tourism</i> Yang Terbentuk Dalam Masyarakat - Pembentukan Kelompok Sadar Wisata Masyarakat	- Warga Masyarakat - Kepala Desa - Ketua RW/RT/Dusun - Tokoh Pengerak Masyarakat - Kepala Dinas Pariwisata - Kepala Desa - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa - Kepala Bappeda

Sumber: Peneliti (2024)

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data penelitian menggunakan prosedur yang disampaikan oleh Neuman (2017, p. 468). Analisis data dimulai dari: 1) *Sort & Classify*; 2) *Open Coding*; 3) *Axial Coding*; 4) *Selective Coding* dan 5) *Interpretatif & elaborate*. Data penelitian dikumpulkan dengan melakukan wawancara kepada informan yang memiliki pemahaman tentang desa wisata berdasarkan pengembangan berbasis masyarakat. Pada proses wawancara, terlebih dahulu pewawancara menjelaskan tema wawancara serta kesediaan informan mengikuti wawancara tersebut. Wawancara dilakukan dengan memperhatikan kondisi informan serta pewawancara menyampaikan bahwa proses wawancara akan direkam menggunakan alat perekam serta dicatat. Pewawancara mendengar dan mencatat semua informasi terkait dari informan dengan fokus bahasan desa wisata dengan pengembangan berbasis masyarakat. Selain itu, pewawancara terlebih dahulu meminta izin untuk menyamarkan nama informan dengan kode tertentu jika informan tidak ingin diketahui identitas aslinya. Pada penelitian ini juga

menggunakan foto sebagai data dengan terlebih dahulu meminta izin kepada informan.

TEMUAN LAPANGAN

Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat

Pariwisata berbasis alam merupakan salah satu sektor yang paling cepat berkembang dalam industri pariwisata (Memetoglu, 2006) dalam (Naidoo, 2011). Kabupaten Muara Enim mempunyai banyak potensi destinasi pariwisata, terutama wisata alam. Menurut Jenkins dan Pigram (2003, dalam Naidoo, 2011) menyatakan bahwa kegiatan pariwisata berbasis alam dapat didefinisikan sebagai semua bentuk rekreasi yang bergantung pada lingkungan alam dan mencakup banyak kegiatan, mulai dari duduk di bawah pohon hingga *hiking* di alam liar, karena keragaman kegiatan dan variasi gaya, ada banyak ekspresi untuk wisata berbasis alam. Sehingga destinasi pariwisata berbasis alam mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan dan akan menjadi destinasi yang menarik. Wisata alam mempunyai daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Tjilen et al. (2023) bahwa pemberdayaan masyarakat lokal bukan hanya tentang memberikan wewenang kepada mereka, tetapi juga tentang menciptakan kesempatan dan dukungan untuk mereka berkontribusi pada pengembangan desa wisata yang berkelanjutan. Namun, dalam perjalanannya terdapat kendala dari manajemen atau pengelolaannya. Pengelolaan embung oleh Karang Taruna dianggap tidak teratur dan tidak memiliki sistem yang jelas. Penghasilan dari berbagai aktivitas, seperti parkir atau penyewaan perahu, dikelola secara pribadi dan tanpa transparansi. Uang yang dihasilkan dari berbagai aktivitas ini tidak dikelola dengan baik atau masuk ke sistem pengelolaan yang resmi. Pengelolaan potensi pariwisata memang membutuhkan ketrampilan dan pengetahuan agar berjalan dengan baik. Kurangnya keterampilan pengelolaan desa wisata membuat pengembangan potensi desa wisata sulit dilakukan (Tjilen et al., 2023).

Secara keseluruhan, Desa Sumber Rahayu menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya menjadi desa wisata dengan adanya dusun-dusun yang terbuka, fasilitas dasar seperti tempat makan dan *homestay*, serta diskusi yang berkelanjutan. Namun, tantangan utama adalah bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat agar pengembangan ini dapat berjalan dengan sukses.

Potensi destinasi pariwisata di Desa Lubuk Nipis adalah potensi pariwisata alam yaitu air terjun, dan potensi destinasi pariwisata di Desa Sumber Rahayu adalah pariwisata alam (embung) dan pariwisata buatan (kolam renang). Namun, kedua desa ini menghadapi kendala yang berbeda dalam pengembangannya. Desa Lubuk Nipis terkendala dalam ketersediaan infrastruktur jalan, yaitu akses menuju ke tempat wisata yang masih berupa jalan setapak, sehingga pengunjung membutuhkan biaya yang banyak dan waktu yang lama untuk menuju kesana. Sedangkan, Desa Sumber Rahayu mengalami kendala dalam partisipasi dan dukungan masyarakat serta manajemen pengelolaan pariwisata yang belum profesional.

Selain itu, dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah pada pengembangan desa wisata yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kabupaten Muara Enim memiliki banyak desa dengan potensi wisata yang sangat menjanjikan, kendala utama adalah kurangnya respons dari pemerintah desa.

Misalnya, Desa Lubuk Nipis memiliki potensi wisata yang bagus, terutama dari sisi sumber daya perairan dan keindahan alam. Namun, upaya untuk mengajak pemerintah desa agar lebih aktif mengembangkan potensi ini masih belum berhasil. Upaya untuk menggerakkan kepala desa sudah dilakukan dengan cara membawa kepala desa untuk berkunjung ke desa lain yang memiliki potensi serupa sebagai contoh. Meskipun telah beberapa kali diupayakan, respons yang diharapkan dari pemerintah desa masih belum ada.

Tujuan utama BUMDes adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat desa. BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan desa mandiri, terutama melalui peningkatan PADes dan pemberdayaan masyarakat (Amalia, 2024). BUMDes dibentuk agar mampu mendorong PAD melalui usaha-usaha yang dikelola secara lokal, seperti pengembangan pariwisata. BUMDes tidak hanya bertindak sebagai penggerak ekonomi desa, tetapi juga memiliki fleksibilitas dalam pembagian pendapatan dan insentif yang tidak dimiliki oleh dana desa. Dengan insentif yang diatur melalui SK kepala desa dan dibagikan berdasarkan kinerja, model ini menciptakan iklim kerja yang lebih produktif dan transparan. Pengelolaan yang baik terhadap BUMDes dan penggunaan hasilnya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pelaku wisata dan masyarakat desa dapat membantu memperkuat ekonomi lokal secara berkelanjutan. Pembagian insentif yang berbasis prestasi juga akan memotivasi masyarakat untuk berkontribusi lebih banyak dalam pengembangan pariwisata dan usaha-usaha lain yang dikelola BUMDes.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan

pengelolaan pariwisata seharusnya sejalan dengan konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan. Strategi pariwisata berkelanjutan harus memprioritaskan partisipasi aktif dan keterlibatan masyarakat lokal, karena mereka sering kali menjadi penjaga warisan budaya dan sumber daya alam yang menarik pengunjung (Snyman, McCool, & Bosak, 2016). Dengan memberdayakan pemangku kepentingan lokal dan memastikan pemerataan manfaat, pariwisata dapat menjadi pendorong kemajuan sosial-ekonomi sambil menjaga integritas aset budaya dan lingkungan. Perencanaan, pengembangan, dan promosi destinasi wisata adalah beberapa aspek kompleks dari proses pengelolaan pariwisata daerah. Seringkali, pariwisata daerah di Indonesia dikelola oleh pemerintah daerah bersama dengan perusahaan swasta dan komunitas lokal.

Analisis pengelolaan pariwisata daerah memerlukan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu destinasi wisata. Salah satu indikator utama dalam analisis ini adalah tingkat kepuasan wisatawan. sebuah studi tentang peran pariwisata di negara berkembang mencatat bahwa meskipun pariwisata dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, masyarakat lokal sering kali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga menimbulkan kekecewaan terhadap pariwisata (Olli, 2013). Mengelola pariwisata daerah secara efektif membutuhkan pendekatan multifaset yang dapat memenuhi beragam kebutuhan dan kepentingan para pemangku kepentingan.

Kondisi pengelolaan pariwisata menekankan pada prinsip-prinsip yang mengutamakan kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai sosial. Pengelolaan harus didasarkan pada kearifan lokal, budaya, dan karakteristik lingkungan lokal (Saputra et al., 2019). Untuk mencapai hasil terbaik dalam pengelolaan pariwisata, semua pihak yang terlibat, seperti pemerintah daerah dan masyarakat, harus mampu berkolaborasi dan bersinergi dengan baik. Selanjutnya Rohayati & Sumanti (2019) menjelaskan bahwa pemerintah daerah, masyarakat setempat, dan investor harus bekerja sama untuk mengelola pariwisata dan meningkatkan pelayanan pariwisata. Selain itu masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi wisata dapat diberdayakan sebagai pemandu wisata atau penjaga kawasan wisata. Namun, pengelolaan ini menghadapi tantangan seperti sarana dan prasarana yang kurang, anggaran yang terbatas, dan partisipasi masyarakat sekitar yang kurang. Hal ini juga dihadapi oleh Kabupaten Muara Enim dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisatanya terutama dalam memberdayakan masyarakat sekitar sebagai pemandu wisata, karena belum memiliki sertifikat sebagai pemandu. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim adalah dengan mengikuti pada pelatihan-pelatihan terkait sadar wisata dan pemandu wisata.

Pengelolaan pariwisata daerah merupakan tugas yang kompleks dan memiliki banyak sisi yang membutuhkan pendekatan yang seimbang untuk memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan, termasuk wisatawan, masyarakat lokal, dan lingkungan. Strategi yang efektif untuk pengelolaan pariwisata daerah yang berkelanjutan harus mempertimbangkan tantangan dan peluang unik dari setiap destinasi, dengan memasukkan masukan dari semua pemangku kepentingan yang relevan untuk memastikan keberlangsungan jangka panjang dan daya saing industri pariwisata.

Faktor Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan Berbasis Masyarakat

Keberhasilan pembangunan *community-based tourism* sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan di desa tersebut. Dibutuhkan seseorang yang mampu memotivasi anggota masyarakat, memberikan informasi dan menjadi jembatan antara masyarakat dan pihak eksternal (Kontogeorgopoulos, Churyen, & Duangsaeng, 2014).

Kepala desa berperan sebagai *local champion* yang seharusnya dapat menjalankan tiga peran penting dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, yaitu fasilitator, mediator dan mobilisator (Aziza & Prameswara, 2023). Dalam menjalankan peran sebagai mediator, Kepala Desa harus mampu untuk membuka interaksi dan membantu komunikasi antara *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan desa wisata. Sebagai fasilitator, Kepala Desa membantu kerjasama antar *stakeholder* sehingga program yang dilaksanakan dapat terintegrasi, dan sebagai mobilisator, Kepala desa berperan sebagai penggerak atau penggagas program-program yang diupayakan dalam pengembangan desa wisata (Aziza & Prameswara, 2023). Peran-peran tersebut tidak terlihat pada Kepala Desa Lubuk Nipis.

Potensi alam Desa Lubuk Nipis sangat menjanjikan, namun tidak dapat terealisasi jika tidak muncul ide-ide kreatif dari seseorang atau kelompok, sebagai *human capital*, dan mewujudkannya dalam bentuk strategi pengelolaan. *Human capital* merujuk pada seorang *local champion* atau pemimpin yang berperan sebagai agen yang

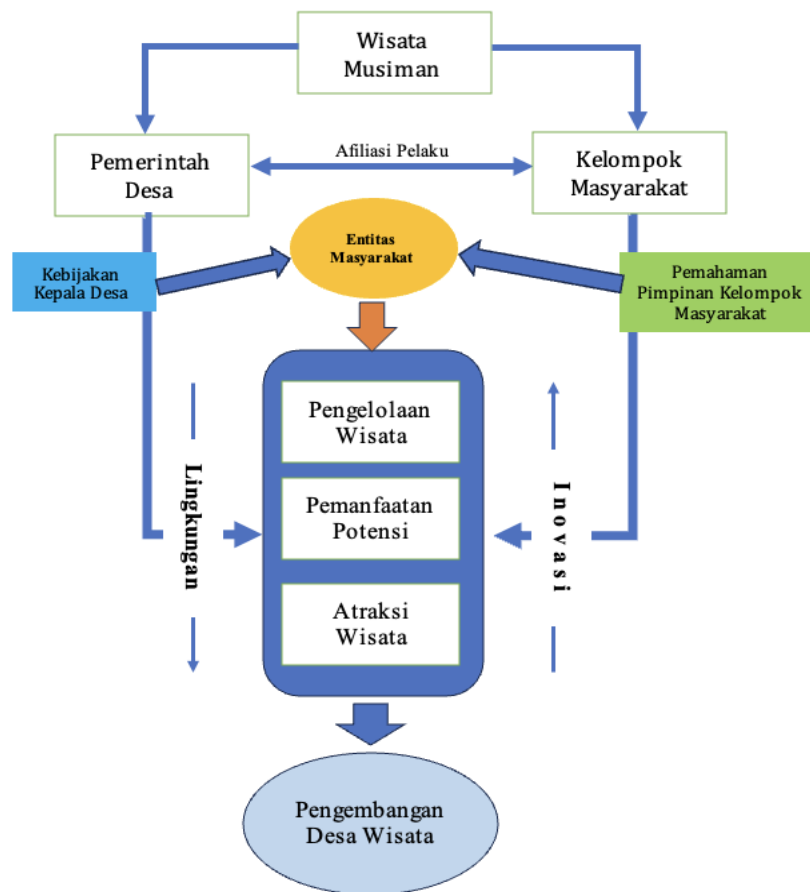
mampu menciptakan ide kreatif menjadi komoditas dan memediasi serta mengaktifkan potensi sosial/model sosial menjadi tindakan kolektif dan menghasilkan kinerja produktif. Di lain sisi, agen yang dimiliki oleh Desa Sumber Rahayu tidak mampu menjalankan ide-ide kreatif tanpa adanya modal sosial, berupa kesadaran kolektif masyarakatnya. Kesadaran kolektif masyarakat memudahkan mobilisasi partisipasi masyarakat dalam proses perintisan dan pengelolaan desa wisata. (Istriyani, 2024)

ANALISIS

Model Pengembangan Pariwisata berbasis Masyarakat

Desa wisata berbasis masyarakat menjadi upaya memanfaatkan berbagai sumberdaya dan kapasitas masyarakat desa. Pemanfaatan sumberdaya bisa berupa aset dan pengetahuan yang dimiliki untuk menghadirkan wisatawan pada sebagian kawasan desa. Pengembangan wisata berbasis masyarakat yang diuraikan terbentuk dari pengelolaan pemerintah desa dan kelompok masyarakat yang memiliki pemanfaatan aset mereka untuk menghadirkan atraksi dan mendatangkan wisatawan pada seputaran wilayah. Pada Kabupaten Muara Enim, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat memanfaatkan akses pendanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dengan terus mengembangkan atraksi wisata air. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan atraksi jenis baru wisata dengan lingkungan terutama iklim yang terbentuk sangat mempengaruhi kondisi destinasi wisata di desa.

Adapun model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Kabupaten Muara Enim memperhatikan kondisi wisata musiman yang mengandalkan ketersediaan air dan keterbatasan atraksi. Selain itu, kelembagaan yang terbentuk berasal dari partisipasi kelompok masyarakat yang melihat peluang serta memiliki tujuan memperbaiki kondisi kehidupan. Pada sisi lainnya, kelembagaan masyarakat dari pemerintah desa yang memang sebagian besarnya juga melibatkan masyarakat yang menjadi perangkat kepengurusannya. Selanjutnya, tantangan berinovasi dalam menghadapi keterbatasan atraksi wisata yang sangat tergantung pada jumlah debit air menjadi penting untuk dicarikan jalan keluar sehingga dapat bergeser secara perlahan dan menarik minat wisatawan untuk datang kembali secara rutin dalam rentang waktu yang tidak lama. Berikut disampaikan konstruksi modelnya.



Gambar 2. Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat
Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Kolaborasi Antar aktor dalam Praktik Dukungan Penguatan CBT

Pariwisata berbasis masyarakat melibatkan pemangku kepentingan guna menyelaraskan proses pengembangan desa wisata. Berbagai interaksi pemangku kepentingan diperlukan dalam pengembangan kepariwisataan di desa berdasarkan peran yang dikerjakan. Berbagai peran pemerintah dengan kewenangan dibutuhkan dalam bentuk fasilitasi dan pendampingan langsung kepada kelompok masyarakat wisata di desa. Selain itu, pemerintah desa juga diperlukan perannya dalam memfasilitasi berbagai upaya lembaga kemasyarakatan untuk mengelola pariwisata serta memberikan dukungan kepada kelompok masyarakat yanggerakkan sektor pariwisata. Peran selanjutnya tentu masyarakat yang menjadi pengelola dan penggerak pariwisata di desa, yang terdiri atas kelembagaan masyarakat serta kelompok masyarakat dengan kepemilikan aset yang dimanfaatkan untuk pariwisata. Sementara itu Zekan et al. (2022) mengungkapkan keterlibatan pemangku kepentingan menjadi hal yang penting dalam pariwisata berkelanjutan. Ada tiga hal yang menjadi perhatian

diantaranya; (1) Konsep daya dukung, (2) Proses Kolaboratif dan (3) Pariwisata Keberlanjutan. Selain itu, memperhatikan kebijakan pemerintah menekankan kolaborasi pentahelix dengan menggali peranan pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (Iman & Alam, 2024), sangat dibutuhkan dalam usaha untuk memperlancar pengembangan desa wisata (Pugra et al., 2021). Pengembangan wisata di desa memerlukan kolaborasi dengan berbagai pihak dengan mendorong proses kolaboratif yang saling memberikan manfaat antar aktor satu dengan yang lainnya serta memberikan keberlangsungan penyelenggaraan desa wisata.

Masyarakat dalam kegiatan pariwisata menjadi tulang punggung dalam mendesain berbagai atraksi pariwisata. Peran masyarakat tidak hanya berhenti dipengelolaannya saja. Mereka juga menyiapkan legalitas kelembagaan guna memberikan jaminan kepastian dalam setiap pelaksanaan di desa. Sayangnya keterbatasan peran masyarakat terjadi disebabkan dengan kepemilikan faktor usaha lainnya yang dimiliki. Pada beberapa lokasi pariwisata, berkebun menjadi fokus utama usaha masyarakat sedangkan pengelolaan destinasi wisata menjadi kegiatan nomor dua, sehingga atraksi menjadi terbatas dan menghasilkan minat kunjungan wisata yang sedikit. Kekuatan kelompok masyarakat menjadi sumber utama dalam mendorong keberhasilan pengelolaan pariwisata di desa (Rusyidi & Fedryansah, 2018). Kelompok masyarakat wajib memiliki kemampuan guna menyelenggarakan kegiatan wisata dengan memanfaatkan berbagai potensi dan modal sosial di masyarakat. Hal ini menunjukkan kelompok masyarakat sebagai katalisator yang melakukan perubahan dengan memanfaatkan potensi pariwisata.

Selanjutnya, pengelolaan pariwisata di desa bersama masyarakat memperhatikan pembagian peran masyarakat lokal sebagai katalisator yang menjadi motor penggerak utama dengan diperkuat oleh kepemimpinan kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan dalam mengelola atraksi pariwisata di desa. Peran masyarakat lokal, yaitu (1) menyediakan sebagian besar atraksi sekaligus menentukan kualitas produk wisata; (2) pelaku budaya, misalnya, kesenian yang menjadi salah satu daya tarik wisata; dan (3) penyedia akomodasi dan jasa pemandu wisata, penyediaan tenaga kerja, produk makanan khas, kerajinan lokal, kesenian lokal, dan sebagainya (Jafar & Resnawaty, 2020). Kelompok masyarakat sebagai katalisator harus mampu memanfaatkan peran dalam pengelolaan pariwisata yang ada dengan memperkuatnya bersama pemangku kepentingan yang ada.

Kepuasan wisatawan pada kunjungan wisata di desa sangat mempertimbangkan manajemen destinasi pariwisata yang dipromosikan melalui media massa. Promosi terhadap pengelolaan pariwisata di desa memberikan kepastian kepada calon wisatawan untuk dapat berkunjung serta mempertebal kepastian dalam memutuskan pilihan untuk berkunjung ke desa yang menjadi tujuan pariwisata di Kabupaten Muara Enim. Kegiatan pariwisata juga membuktikan manajemen pariwisata memberikan pelayanan yang handal dalam menangani berbagai kebutuhan terhadap kunjungan wisatawan. Manajemen pengelolaan pariwisata menjadi bagian yang tidak dipisahkan menjadi inputan kepada calon wisatawan dalam memutuskan kunjungan ke destinasi pariwisata di desa.

Pemangku kepentingan dalam pengembangan wisata di desa berbasis masyarakat didasarkan pada model *Penta-Helix* untuk menerjemahkan interaksi.

Terdapat lima kelompok aktor dengan interaksi yang terjadi dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di desa. Dari interaksi yang diuraikan diatas terdapat beberapa yang dapat dirumuskan dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Interaksi tersebut memiliki kedekatan sebagai integrator, katalisator, fasilitator, regulator dan inovator. Pemangku kepentingan guna mendorong pengembangan pariwisata di desa berbasis masyarakat dijelaskan pada konsep interaksi yang menghasilkan luaran nantinya.

Tabel 1.
Interaksi Pemangku Kepentingan Dalam Pengembangan
Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa

Pendekatan Interaksi	Aktor		Aktivitas
	Utama	Pendukung	
Katalisator	Masyarakat	• Pemerintah Desa • Pemerintah Daerah • Akademisi	• Penumbuhan inisiatif lokal (<i>local champion</i>) terhadap pengembangan atraksi pariwisata
Fasilitator	Pemerintah Daerah	• Dunia Usaha • Akademisi • Media Massa	• Pengembangan kerangka program/kegiatan kepariwisataan dan jejaringnya • Penguatan pengetahuan kelompok masyarakat sadar
Integrator	Masyarakat	• Pemerintah Desa • Dunia Usaha • Media Massa	• Penguatan produk pariwisata lokal berbasis kapasitas lingkungan • Promosi kegiatan pariwisata lokal desa
Inovator	Masyarakat	• Pemerintah Daerah • Akademisi	• Pengembangan <i>ecotourism berwawasan lingkungan</i> • Pengintegrasian budaya lokal dalam atraksi pariwisata • Penguatan akses pembiayaan pembangunan destinasi wisata
Regulator	Pemerintah Daerah	• Pemerintah Desa • Akademisi • Masyarakat	• Penyusunan regulasi kepariwisataan di desa • Program/kegiatan pengembangan usaha desa wisata

Sumber: Hasil penelitian (2024)

Faktor Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat

Perkembangan wisata di desa menjadi desa wisata bertransformasi secara perlahan dengan didukung faktor keterlibatan masyarakat; citra pariwisata; dan kebijakan pemerintah daerah. Faktor pengembangan desa wisata berbasis masyarakat menitikberatkan masyarakat sebagai aktor utamanya serta keterlibatannya dalam membangun serta merancang atraksi pariwisata. *Community Based Tourism* yaitu membuka ruang dan peluang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pengembangan suatu daya tarik wisata, dengan ikut berpartisipasi. Masyarakat lokal ikut mendapatkan manfaat dan keuntungan secara ekonomis dari partisipasi mereka. Usaha-usaha pengembangan kepariwisataan haruslah ditunjang oleh partisipasi

pemerintah dan masyarakat, sehingga perlu adanya peningkatan daya tahan, masyarakat dan negara atas pengaruh-pengaruh negatif yang mungkin timbul (Wardoyo, 1987). Selain itu masyarakat lokal ikut bertanggung jawab untuk menjaga serta melestarikan sumber daya pariwisata yang ada di kawasan daerah tempat mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat menjadi ukuran keberhasilan dalam pengembangan masyarakat melalui kapasitas yang tercipta di desa. Terdapat 2 (dua) kluster utama desa di Kabupaten Muara Enim seperti sudah dijelaskan terdahulu dengan basis asal-usul masyarakat yang mendiami desa dan pekerjaan utama dari masyarakat.

Partisipasi masyarakat dengan terlibat dalam manajemen pariwisata pada pengelolaan destinasi wisata memberikan peluang kesempatan bekerja. Masyarakat lokal yang bekerja dalam kegiatan pariwisata di desa mengambil peran secara mandiri dan berkelompok pada proses kerja tertentu. Desa yang mengembangkan kepariwisataan membuat beberapa kelompok kerja guna mengatur kegiatan. Pengelolaan kegiatan pariwisata di Kabupaten Muara Enim sangat tergantung pada kehadiran masyarakat yang dekat dengan lokasi pariwisata, sehingga mempermudah dalam mengorganisasikan berbagai kebutuhan wisatawan yang hadir di desa. Kelompok masyarakat yang berfokus dalam memainkan perannya sesuai dengan kapasitas dan pengetahuan lokal yang tersedia. Kemampuan kepemimpinan memberikan pengaruh dalam berbagai tindakan kelompok masyarakat pada aktivitas kepariwisataan di desa. Partisipasi dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat memberikan kesempatan untuk menggali berbagai potensi pembangunan destinasi wisata. Penggalan potensi membutuhkan dukungan dari masyarakat desa yang terlibat mulai dari proses perencanaan hingga pengelolaan. Hal tersebut, menjadi terbatas pada kelompok yang intensitasnya terlibat langsung dalam pengelolaan pengembangan pariwisata di desa.

Selain partisipasi, Kebijakan penguatan desa wisata berbasis masyarakat memiliki peluang dengan memanfaatkan sumber pembiayaan dari dana desa. Peraturan daerah terkait dengan penggunaan dana desa dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan lingkup kawasan pedesaan dengan karakteristik serta kapasitas masyarakat yang tinggal dan bermukim pada wilayah desa. Pemanfaatan dana desa lebih berfokus pada sebuah tematik pembangunan yang akan dilakukan pemerintah desa, mulai aspek pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan. Untuk itu, pemerintah kabupaten memastikan penetapan desa dengan potensi pariwisata yang tersedia dengan kepemilikan destinasi wisata serta potensi masyarakat yang memiliki pola pikir terhadap sektor pariwisata yang kuat yang dapat dilihat dari kelembagaan yang terbentuk diawali dari kebutuhan masyarakat. Penetapan desa wisata memberikan jaminan bagi penyelenggara pemerintah desa dan masyarakat di desa dalam mengembangkan kepariwisataan di desa baik penguatan masyarakat dan pembangunan destinasinya. Saat ini, penetapan desa wisata wajib diperkuat melalui keputusan kepala daerah sebagai sebuah entitas pembangunan yang nantinya diakses pembiayaan, kolaborasi pembangunan, dan menjadi terget perubahan daerah.

Dana desa menjadi modal finansial yang bisa disalurkan langsung ke BUMDesa, LKD dan kelompok masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Dana desa ini membutuhkan kerangka kebijakan yang perlu disediakan bersama pemerintah daerah melalui norma pengaturan bupati. Pengaturan penggunaan dana desa memerlukan

pembiayaan yang didukung melalui dana desa yang pengaturannya secara umum adalah mengatur kegiatan pembangunan dan pemberdayaan (Budi et al., 2020). Dengan demikian pemerintah desa dapat mengacu serta berpedoman pada regulasi yang ditetapkan dalam pengalokasian pembiayaan dana desa di Kabupaten Muara Enim. Pembiayaan pembangunan desa wisata mendapatkan dukungan pembiayaan serta kebijakan dari pemerintah desa. Berbeda dengan kelompok masyarakat yang mengelola sektor pariwisata terkadang memiliki akses pendanaan lainnya. Penetapan desa wisata menjadi unsur penting dalam pelaksanaan wisata di desa untuk memperkuat sektor pariwisata di desa. Penetapan program desa wisata akan dirumuskan dalam kebijakan pemerintah kabupaten berupa Peraturan Bupati, sehingga memberikan kepastian dan kejelasan pengalokasian penggunaan dana desa oleh pemerintah desa (Fikri & Septiawan, 2020). Rumusan kebijakan penggunaan dana desa untuk pengembangan pariwisata di desa meliputi pengembangan kelompok pemasaran wisata desa dan pembiayaan pembangunan destinasi pariwisata desa.

Kebijakan penguatan terhadap sektor pariwisata di daerah memiliki dampak langsung terhadap pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di desa. Kebijakan tersebut menjadi landasan motivasi bagi para pelaku wisata di desa dalam memperkuat citra wisata. Bagian dari pariwisata, citra menjadi bentuk komunikasi *intangible* terhadap wisatawan yang hendak berkunjung ke desa-desa di Kabupaten Muara Enim. Citra wisata memberikan pengaruh pengambilan keputusan wisatawan dalam menentukan pengambilan keputusan untuk hadir pada destinasi tertentu. Citra wisata pada sebuah tempat wisata harus mampu mengembangkan *image* yang tepat sehingga mampu menarik, menciptakan kepuasan dan loyalitas wisatawan (Ramseook Munhurrun, Seebaluck, & Naidoo, 2015; Carballo et al., 2015). Citra tersebut digali dari komponen *affective image*, yang menunjukkan perasaan maupun respon emosional yang terbentuk terhadap suatu destinasi wisata (Gartner, 1994; Baloglu & McCleary, 1999). Komponen *conative image* mewakili perilaku, yaitu niat untuk mengunjungi atau mengunjungi kembali suatu destinasi (Gartner, 1994). Sedangkan *overall image* (Baloglu & McCleary, 1999) atau *holistic image* (Um & Crompton, 1990) merupakan evaluasi dalam bentuk sikap terhadap atribut pariwisata yang dirasakan di suatu destinasi dari segi perseptual/kognitif dan afektif dalam tingkat yang lebih besar. Destinasi desa wisata berfokus pada menarik wisatawan untuk hadir dan menciptakan kepuasan untuk merasakan pengalaman berkunjung ke destinasi wisata di desa.

Destinasi pariwisata yang diciptakan di desa-desa pada Kabupaten Muara Enim, sebagian besar merupakan destinasi buatan dengan menyediakan wahana air begitu juga dengan destinasi alam serupa. Kegiatan pariwisata di desa memiliki waktu tempuh rata-rata 1,5 jam sampai dengan 2 jam dari lokasi tempat tinggal ataupun wilayah pemukiman yang dekat dengan destinasi wisata. Hal ini yang dirasakan ketika berkunjung ke destinasi pariwisata di desa. Memang tidak semua desa Kabupaten Muara Enim memiliki destinasi wisata. Hanya desa tertentu yang memiliki destinasi pariwisata baik yang alami ataupun buatan dan cukup berjarak antara destinasi satu dengan destinasi lainnya. Untuk itu, ketertarikan wisatawan terhadap destinasi berwahan air menjadi pilihan dalam kunjungan pariwisatanya. Kondisi destinasi saat ini sangat tergantung pada debit air wahana atraksi wisata seperti tempat makan, tempat rekreasi dan sarana transportasi menuju destinasi wisata. Destinasi pariwisata di desa memiliki tantangan dalam perkembangannya. Untuk kondisi saat ini, pariwisata

yang terbentuk di desa wisata merupakan wisata musiman memang. Citra wisata yang terbentuk memang masih sederhana dengan pengelolaan masih kondisional, yaitu ketika waktu liburan atau kesempatan lainnya wisatawan berkunjung. Destinasi wisata di desa saat ini memang dirasakan cukup memenuhi kepuasan masyarakat dalam berwisata yang setara dengan kemampuan masyarakat yang terbentuk. Kegiatan pariwisata dilakukan oleh masyarakat lokal kabupaten Muara Enim serta daerah sekitarnya yang sering berkunjung menikmati waktu liburan mereka dan hanya sebatas waktu tersebut.

Faktor pengembangan wisata berbasis masyarakat yang tercipta dari kondisi destinasi desa wisata didorong oleh keterlibatan masyarakat sebagai pengelola serta pelaku. Keterlibatan masyarakat memberikan dampak luas terhadap kehadiran wisatawan pada tiap destinasi pariwisata. Pengelolaan memegang peran penting dalam mengatur melalui kerangka kerja kelompok kerja baik yang didukung kelompok masyarakat atau kelembagaan masyarakat yang terbentuk di desa. Selain faktor partisipasi, faktor kebijakan pariwisata menjadi landasan sebagai pegangan utama dalam masyarakat dan pemerintah desa mengalokasikan sumberdaya untuk pengembangan desa wisata. Sumber daya berasal dari kebijakan yang disajikan kedepan dengan kerangka pemanfaatan pembiayaan lainnya serta kebijakan akselerasi dalam menjaga keberlangsungan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat di desa. Faktor kognitif dan afektif menjadi penghitung dalam menjaga keberlangsungan pariwisata berbasis masyarakat dengan pengelolaan citra pariwisata untuk terus dapat mendatangkan wisatawan. Keberadaan citra wisata yang positif memberikan peningkatan terhadap kunjungan wisata sekaligus arah pembangunan destinasi serta atraksi pariwisata di desa. Dirumuskan faktor-faktor pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di desa wisata sebagaimana pada gambar berikut.



Gambar 2. Faktor Pengembangan *Community Based Tourism* (CBT)

Sumber: (Hasil Penelitian, 2024)

PENUTUP

Kesimpulan

1. Model pengembangan desa wisata berkelanjutan berbasis masyarakat melalui penguatan kebijakan dengan menitikberatkan berbagai kerja serta upaya masyarakat baik berupa unsur kelembagaan kemasyarakatan ataupun entitas kelompok masyarakat mandiri mengelola pariwisata, sehingga dapat diuraikan fakta sebagai berikut:
 - a. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat hadir dengan dua pendekatan berasal komunitas pembentuk berasal dari lembaga kemasyarakatan dan kelompok masyarakat mandiri yang menjadi motor hadirnya berbagai atraksi pariwisata di desa. Kedua komposisi kelembagaan pengelola pariwisata berasal dari masyarakat dengan dua pendekatan *bottom-up* dan sebaliknya dengan memperhatikan kebutuhan serta tujuan.
 - b. Pariwisata berbasis masyarakat di desa wisata pada Kabupaten Muara Enim melayani wisatawan musiman yang hadir pada periode tertentu ketika masyarakat memiliki kesempatan dalam berpariwisata di desa. Kelompok masyarakat pengelola pariwisata memerlukan strategi inovasi dalam pengembangan atraksi pariwisata di desa, sehingga dapat menarik minat wisatawan hadir berulang pada destinasi.
 - c. Pengembangan pariwisata di desa wisata sangat berdampak pada pengembangan inovasi pada atraksi wisata dengan kondisi iklim dan lingkungan yang terbentuk mempengaruhi kegiatan pariwisata.
2. Peran pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat melalui upaya keterlibatan serta interaksi aktor *pentahelix* dalam menyinergikan berbagai bentuk kolaborasi yang terbentuk, sehingga dapat dirumuskan beberapa fakta sebagai berikut:
 - a. Pemangku kepentingan ditinjau dari *pentahelix* dengan interaksi dan aktivitas yang dilakukan dalam mendukung pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dengan membagi aktor unsur utama dan pendukung yang dipadukan dengan aktivitas dalam pendekatan interaksi.
 - b. Pendekatan interaksi dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat terdiri atas aktor utama serta aktor jejaring. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan regulator sedangkan kelompok masyarakat menjadi aktor utama sebagai katalisator, integrator dan inovator.
 - c. Kolaborasi pemangku kepentingan saling mengikat antar aktor pada interaksi, sehingga dibutuhkan energi besar dari aktor pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam menjamin keberhasilan model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.
3. Faktor-faktor pengembangan desa wisata berbasis masyarakat memperhatikan konsep yang diajukan dalam memperkuat dimensi utama dari kehadiran masyarakat lokal sebagai pengelolanya, sehingga menjadi fokus kerangka pengembangan kebijakan sebagai berikut:
 - a. Partisipasi masyarakat menjadi faktor utama dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di desa. Partisipasi masyarakat ditinjau dari kelembagaan kemasyarakatan tertentu dan kelompok masyarakat mandiri melalui faktor

pengerak yang berbeda pada kedua sisi tersebut serta kekuatan partisipasi yang menjadi sumber utama mengerakkan masyarakat.

- b. Faktor berikutnya yang paling potensial dalam mendukung pengembangan pariwisata berbasis masyarakat berkembang dari kegiatan yang dilakukan dengan agenda kebijakan akselerasi berfokus pada program kegiatan, pemanfaatan dana desa serta kapasitas masyarakat desa.
- c. Faktor penguat lainnya merupakan citra destinasi wisata yang berguna untuk menjadi parameter pembentuk dukungan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang masih ditinjau pada aspek *affective image* sehingga diperlukan pengembangan parameter ke *cognitive image* dalam memandu pembangunan destinasi wisata di desa.

Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang terumuskan dari hasil penelitian ini berupa rujukan kebijakan yang nantinya perlu dilakukan oleh berbagai pihak, meliputi :

1. Pemerintah Daerah
 - a. Setda, Bappeda, Dinas PMD dan Dinas Pariwisata menyiapkan kerangka kebijakan tentang pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan dalam menyinergikan pembangunan destinasi dengan pengelolaan kelompok masyarakat dan kelembagaan kemasyarakatan desa.
 - b. Dinas Pariwisata beserta Dinas PMD mengalokasikan pembiayaan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dengan memanfaatkan pengaturan penggunaan dana desa yang lebih spesifik bagi desa dengan potensi wisata yang dimiliki dengan alokasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk pariwisata.
2. Pemerintah Desa
 - a. Dinas PMD, menyiapkan berbagai agenda kegiatan dengan pengalokasian pembiayaan dari dana desa.
 - b. Dinas PMD, mendorong partisipasi dan kolaborasi bersama masyarakat desa dalam pengembangan berbagai atraksi pariwisata di desa, sehingga masyarakat desa memahami konsep desa wisata sebagai upaya usaha dalam peningkatan ekonomi desa.
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan kelompok masyarakat
 - a. Dinas PMD beserta Dinas Pariwisata melakukan penguatan LKD terhadap manajemen kepariwisataan dan pengelolaan destinasi pariwisata.
 - b. Dinas PMD beserta Dinas Pariwisata membagi berbagai tugas dalam kelompok kerja yang mendukung pelaksanaan pengembangan desa pariwisata berbasis masyarakat.
 - c. Dinas PMD beserta Dinas Pariwisata menjadikan citra wisata desa menjadi parameter dalam mengembangkan kapasitas pariwisata berbasis masyarakat.
4. Masyarakat
 - a. Dinas PMD beserta Dinas Pariwisata berpartisipasi dalam pengembangan dan kegiatan pariwisata di desa
 - b. Dinas PMD beserta Dinas Pariwisata memperkuat pengetahuan tentang daerah wisata serta penguatan terhadap literasi wisata di desa

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, S. P. (2024). KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENGELOLAAN WATERPARK TIRTOREDJO DI DESA SUDIMORO KABUPATEN MAGELANG. *Journal of Politic and Government Studies*, 13, 213–222.
- An overview. (2017). *Marketing Challenges before Small Tourism Enterprises*:
- Anshori, H. A. Al. (2023, April 3). *Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan*.
<https://Insanwisata.Id/Pembangunan-Pariwisata-Berkelanjutan/>.
- Aromatica, D., & Sitriwanti, M. (2019). Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Danau Singkarak Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 1–6.
- BPS, K. M. E. (2024). *KABUPATEN MUARA ENIM DALAM ANGKA 2024* (Vol. 34).
<https://webapi.bps.go.id/download.php?f=Up9+48Go4ripX+gm8+Ona2oGaiXK/wI5l2VVRzqt/GXvtbBXJTtbvcLaDbYxQ4JHjElHAbglcnjduGbjz4LghG6NHox24Rm5fUQrWfR/E/MKICNhCnqOXfR55P4EHLnftGwsEJ2CoTAs3Sl7erhmzPuRSqFR67N6Jx/e/b718NG6gFpcaDAn3cOR+/v9ir3CavP6J4GceHt0BL6i2sYNWsnZSyIU5vW0wxY9amdfbrJbs9ITLJOjxOHwLUHZe+6i1pPXMMFA32klmFRFTh8DTA==>
- Budi, P. Z., Prananingtyas, P., & Widanarti, H. (2020). Tinjauan Yuridis Pembangunan Desa Vokasi Pariwisata Dengan Pemanfaatan Dana Desa. *Diponogoro Law Journal*, 9(1).
- Fatmasari, A. R., Harahap, A., Navratilova, I., Andjanie, L., Annisa, ; Analisis Perkembangan Infrastruktur Pariwisata Di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (kspn) Rupert, & Bengkalis, K. (2023). *Analisis Perkembangan Infrastruktur Pariwisata Di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (Kspn) Rupert*. 8(2). <https://doi.org/10.36418/Syntax>
- Fikri, Z., & Septiawan, Y. (2020). Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Kurau Barat. *Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, & Sosial (Publicio)*, 2(1).
- Habiba, M., & Lina, F. Y. (2023). Community-Based Tourism (CBT): A Community Development Tool. *European Journal of Business and Management* 151, 15(17), 1–7.
<https://doi.org/10.7176/ejbm/15-17-01>
- Hanggraito, A. A., Ermawati, A., Riandy, E., Program, C., Manajemen, S., Pariwisata, B., & Banyuwangi, P. N. (2023). Pengembangan Blueprint Wisata Desa Dan Paket Wisata Sebagai Upaya Akselerasi Desa Tambong Sebagai Desa Wisata. In *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 1, Issue 1).
- Iman, P. T., & Alam, S. M. (2024). Peran Pentahelix dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Bonjeruk, Kabupaten Lombok Tengah. *Cendikia: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 1(7), 305–316. <https://doi.org/10.62335>
- Izmi, D. S., & Prathama, A. (2023). Pengembangan Desa Wisata Berbasis BUMDES. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(3). <https://jkp.ejournal.unri.ac.idhttps://jkp.ejournal.unri.ac.id>
- Jafar, S. A., & Resnawaty, R. (2020). *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Linggarjati Kuningan, Jawa Barat*. 4(1).
- Jaka Waskita, M. T. P. (2008). *STRATEGI PEMASARAN PARIWISATA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH*. 5–24.
- Khairina, U. (2022). Strategi Komunikasi Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Aceh Tengah Dalam Promosi Industri Wisata Lokal. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 5(1), 35. <https://doi.org/10.22373/jp.v5i1.12808>

- Mulyadi, M. (2013). Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 15(1), 128. <https://doi.org/10.31445/jskm.2011.150106>
- Naidoo, P. (2011). AN ASSESSMENT OF VISITOR SATISFACTION WITH NATURE-BASED TOURISM ATTRACTIONS. *INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING RESEARCH*, 4(1). <http://ssrn.com/abstract=1881032>
- Neuman, W. L. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (I). PT Indeks.
- Noor Rochman. (2016). Jurnal Equilibria Pendidikan Vol. 1, No. 1, 2016. *Jurnal Equilibria Pendidikan*, 1(1), 27–39.
- Nurchayono, O. H. (2017). Kapasitas Komunitas Lokal dalam Pengembangan Pariwisata Pedesaan. *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi*, 1(1), 42. <https://doi.org/10.20961/habitus.v1i1.18854>
- Olli, D. (2013). The challenges for the European tourism sustainable. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 4(9), 464–468. <https://doi.org/10.5901/mjss.2013.v4n9p464>
- Pebriani, R. A., Rum Hendarmin, R. M., & Romli, H. (2024). Peningkatan Pendapatan dengan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata di Desa Tanjung Baru. *Pengabdian Kepala Masyarakat*, 4(2), 295–304.
- Permatasari, I. (2022). Peran Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism) di Bali. *Kertha Wicaksana*, 16(2), 164–171. <https://doi.org/10.22225/kw.16.2.2022.164-171>
- Pugra, I. W., Oka, I. M. D., & Suparta, I. K. (2021). Kolaborasi Pentahelix Untuk Pengembangan Desa Timpag Menuju Desa Wisata Berbasis Green Tourism. *Bhakti Persada*, 7(2), 111–120. <https://doi.org/10.31940/bp.v7i2.111-120>
- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40. <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>
- Randi, R., Kholek, A., & Izzudin, M. (2020). PENGEMBANGAN TATA KELOLA PARIWISATA DI DESA TANJUNG MEDANG (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes). *Seminar Nasional AVoER XII*, 389–396. <https://www.researchgate.net/publication/358280533>
- Ratwianingsih, L., & Mulyaningsi, T. (2021). Analisis Potensi Dan Upaya Pengembangan Desa Wisata Alam Kepuh-Sari Manyaran Wonogiri. *Jurnal Kuat: Keuangan Umum Dan AKutansi Terapan*.
- Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). *Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama* (Vol. 5, Issue 2).
- Rizki Lubis, M., Ramadhan, I., Sibarani, C., Andri, D., Christin, J., Wijaya Ritonga, P., & Pariwisata Medan, P. (n.d.). *COMMUNITY PERSPECTIVE ANALYSIS OF SUSTAINABLE TOURISM VILLAGE DEVELOPMENT IN BATU JONG-JONG VILLAGE, LANGKAT DISTRICT, NORTH SUMATRA PROVINCE 1*.
- Rohayati, W., & Sumanti, D. (2019). Analisis Pengelolaan Pariwisata Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Merangin Tahun 2018. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 8(1), 29–34. <https://doi.org/10.22437/jmk.v8i1.6932>
- Rosadi, H., Putra, E. H., Ulfianah, E., Chairunnisa, A., Maulidda, R., Husni, N. L., & Handayani, A. S. (2022). Peranan PT. Pertamina EP Prabumulih Field dalam Mendukung Danau

- Shuji Menjadi Desa Wisata di Kabupaten Muara Enim. *Pendidikan Dan Konseling*, 4(5), 1052–1058.
- Rusydi, B., & Fedryansah, M. (2018). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), 155–165.
- Saputra, G. R., Zaenuri, M., Priyo Purnomo, E., & Dian Fridayani, H. (2019). Kemitraan Pengelolaan Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 (Studi Kasus Objek Wisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya). *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 298–341.
<https://doi.org/10.31629/kemudi.v3i2.896>
- Saraswati, E., Athia, I., & H. (2018). Building Strategy to Promote Tourism Destination Attractiveness and Competitiveness in Developing Area: A Case of Bojonegoro Regency, East Java, Indonesia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*.
- Sbm, N. (2020). *BEBERAPA MASALAH DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DI INDONESIA*. 7(2). <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jp>
- Selviyanti, R., Bustan, J., Jalaludin Sayuti, A., Administrasi Bisnis, J., & Negeri Sriwijaya, P. (2020). POTENSI DAYA TARIK WISATA BATIK KUJUR DI KABUPATEN MUARA ENIM THE POTENTIAL TOURIST ATTRACTION OF KUJUR BATIK IN MUARA ENIM DISTRICT. In *Jurnal Terapan Ilmu Ekonomi* (Vol. 1, Issue 1).
<http://jurnal.polsri.ac.id/index.php/jtiemb>
- Snyman, S., McCool, S., Bosak, K. (eds). (2016). Strategic Community Participation in Sustainable Tourism. In: *Reframing Sustainable Tourism. Environmental Challenges and Solutions*, Springer, Dordrecht., Vol 2.
- Syaiful, B. A., Basalamah, A., Abdillah, F. A., & Agus, R. T. (2023). Penerapan Kriteria Desa Wisata Pada Desa Wisata Batulayang, Bogor, Jawa Barat. *Kontan: Jurnal*, 1(5), 2023–2031.
- Tjilen, A. P., Waa, R. F. Y., Ririhena, W. S., Tambaip, B., Syahrudin, Ohoiwutun, Y., & Prihandayani, D. R. (2023). Optimalisasi Potensi Desa Wisata (Alexander Phuk Tjilen, dkk.) | 38 Nanggroe. *Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(6), 38–49.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8373947>
- Tkaczynski, A., Rundle-Thiele, S. R., & Beaumont, N. (2008). Insights Into How Regional Tourism Operators View Their Markets. *International Journal of Organisational Behaviour*, 13(1), 16–27.
- Tosun, C. (2000). Limits to community participation in the tourism development process in developing countries. *Tourism Management*, 21(6), 613–633.
[https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(00\)00009-1](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(00)00009-1)
- Utami, M. M., Taufik, H., & Bhakti, W. N. (2019). Village Tourism : The Implementation Of Community-Based Tourism. *Advances in Economics, Business and Management Research, Volume 100*.
- Vahdatiyekta, P., Zniber, M., Nikiforow, K., & Huynh, T. P. (2024). Synthesis and characterization of N,N'-bis(2-thienylmethylene)-1,X-diaminobenzene isomers (X = 2, 3, 4) and their metal complexes. *Materials Advances*, 3(2), 110–117.
<https://doi.org/10.1039/d3ma01179h>
- Valentino Elim, Y., Istiqlaal, S., & Modena, A. P. (2019). *Perumusan Indeks Penilaian 5A (Attraction, Accessibilities, Amenities, Accommodation Dan Awareness) Untuk Obyek Wisata Pantai Lasiana Kupang Provinsi NTT Formulation of the 5A Index (Attraction,*

- Accessibilities, Amenities, Accommodation and Awareness) for Lasiana Beach Tourism Object in Kupang NTT Province. 2(2), 20–38. <http://www.flobamora.e-journal.id20>*
- Wang, J., Huang, X., Gong, Z., & Cao, K. (2020). Dynamic assessment of tourism carrying capacity and its impacts on tourism economic growth in urban tourism destinations in China. *Journal of Destination Marketing and Management, 15*(September 2019), 100383. <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2019.100383>
- Wardoyo, O. S. (1987). Mobilitas Manusia Dalam Rangka Pengembangan Kepariwisata Di Indonesia. *Akrawala Pendidikan No. I, 6*(1).
- Windayani, I. A. R. S., & Marhaeni, A. A. I. N. (2019). THE EFFECT OF TOURISM VILLAGE DEVELOPMENT ON COMMUNITY EMPOWERMENT AND WELFARE IN TOURISM VILLAGE OF PANGLIPURAN, BANGLI DISTRICT OF INDONESIA. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences, 94*(10), 257–265. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-10.33>
- Yin, R. K. (2003). *Robert K. Yin Case Study Research Design and Methods, Third Edition, Applied Social Research Methods Series (III)*. Saga Publication Ltd.
- Zekan, B., Weismayer, C., Gunter, U., Schuh, B., & Sedlacek, S. (2022). Regional sustainability and tourism carrying capacities. *Journal of Cleaner Production, 339*(January), 130624. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.130624>